
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA TAHUN 2013)

Wulandari

Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article History :

11 Desember 2015

29 Maret 2016

Keywords :

Local Government

Financial Statement

Mandatory Disclosure

Local Government Characteristics

Government Accounting Standard

ABSTRACT

The purpose of this study is analyze the influence of Local Government characteristics on mandatory disclosure level of local government financial statements (LGFR). Characteristics of local governments used in this research are size of the local government, legislature size, administrative age, wealth of the local government, functional defferentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio, debt financing and population. Mandatory disclosure compliance is measured by 46 items based on government accounting standard.

This study uses puposive sampling method. A total of 134 financial statements of Indonesian's local governments Regencies/Cities for 2013 were selected to be sample with average of local government financial statements disclosure level is 58,60%. This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, functional defferentiation, have positive effect on the local goverment financial statements disclosure, while financial self-sufficiency ratio have negative effect. The size of the local government, legislature size, occupational specialization, debt financing and population proved to have no effect on the local government financial statements disclosure.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih (Syafitri, 2012). Salah satu upaya konkrit mewujudkan, pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan.

Salah satu prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) pengungkapan dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Dalam sektor publik, standar akuntansi yang digunakan adalah SAP berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pemerintah pusat maupun daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Suhardjanto dan Lesmana, 2010).

Fenomena yang terjadi bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia masih rendah, rata-rata sebesar 35,45% (Liestiani, 2008), 22% (Lesmana, 2010), 51,56% (Suhardjanto, et.al, 2010), dan 44,56% (Hilmi, 2011), 52,09% (Syafitri, 2012). Fenomena lain yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini audit yaitu *adverse* dan *disclaimer*.

Dari penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota tahun 2008-2009.

Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengungkapan wajib LKPD di Indonesia. Lebih lanjut, informasi akuntansi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Cohen dan Kaimenakis, 2008). Fokus penelitian ini yaitu pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang membandingkan antara pengungkapan dalam LKPD dengan yang seharusnya diungkapkan berdasarkan SAP (Syafitri, 2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012). Penelitian ini menguji beberapa variabel

independen karakteristik pemerintah daerah pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012), yaitu ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dan pembiayaan utang. Ditambahkan pula variabel independen lainnya yang diadopsi dari penelitian Hilmi dan Martani (2012), yaitu jumlah penduduk. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012), data yang digunakan adalah LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013.

PENURUNAN HIPOTESIS

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2010). Gunawan (2001) menyatakan bahwa organisasi besar akan lebih banyak disorot oleh publik dan memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Begitu pula pada sektor pemerintahan, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangannya (Syafitri, 2012). Dengan demikian, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi terhadap pengungkapan wajib sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007). Sehingga, pemerintah daerah yang memiliki aset besar akan lebih mungkin untuk melakukan pengungkapan secara lengkap sesuai SAP daripada pemerintah daerah dengan aset yang lebih kecil.

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang bertugas mengawasi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada dengan sebaik mungkin. Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012); Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa jumlah anggota legislatif atau DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab lagi dalam pelaporan keuangan serta mendorong pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP.

H2 : Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib Pemerintah Daerah.

Syafitri (2012) menyatakan bahwa umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya.

Hammami (2009) menyatakan bahwa organisasi yang sudah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi dalam

laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki "track record" sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan.

Dengan demikian, semakin lama keberadaan suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pula tingkat pengalaman dalam menjalankan sistem administrasi, pencatatan dan pengungkapan wajib.

H3 : Umur administratif Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kinerja sebuah pemerintah daerah yang ditunjukkan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu pemerintah daerah memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk menunjukkannya kepada *stakeholders* sebagai bentuk *signal* dari manajemen publik yang baik.

PAD yang memproksikan kekayaan daerah merupakan penerimaan dalam wilayahnya sendiri yang bersumber dari masyarakat yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya. Sehingga, semakin besar kekayaan Pemerintah Daerah akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.

H4: Kekayaan Pemerintah Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD.

Di Indonesia, diferensiasi fungsional dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam

membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah tersebut. Semakin kompleks suatu pemerintahan maka akan semakin banyak jumlah SKPDnya. Semakin banyak jumlah SKPD semakin banyak pula informasi yang harus diungkapkan sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan akan mengakibatkan pengungkapan wajib LKPD semakin lengkap.

Penelitian Damanpour (1991); Patrick (2007) juga menemukan bahwa diferensiasi fungsional (jumlah SKPD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib secara lengkap. Sehingga semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia terkait pengungkapan (Mandasari, 2009).

H5: Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD.

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki administratur dengan spesialisasi pekerjaan yang ditunjukkan dengan keterampilan dan pelatihan yang tinggi khususnya di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* dibanding dengan Pemerintah Daerah yang administraturnya memiliki keterampilan dan pelatihan yang rendah.

Sehingga, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi dimungkinkan lebih mudah untuk memahami dan menerapkan SAP, hal ini akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan wajib secara lengkap pada laporan keuangannya.

H6 : Latar belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD.

Syafitri (2012) menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar menganalisis kinerja keuangannya. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada APBD.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002).

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka akan memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya.

H7: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Pembiayaan utang (*leverage*) merupakan sumber pendanaan yang berasal dari organisasi lain. Organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Laporan keuangan digunakan oleh kreditur sebagai alat untuk menilai kemampuan organisasi dalam membayar kewajibannya dimasa yang telah ditentukan (Syafitri, 2012). Oleh karena itu, kreditur seringkali

menghendaki pengungkapan yang lengkap pada laporan keuangan untuk menghilangkan keragu-raguannya terhadap pemenuhan haknya.

Semakin besar pembiayaan utang maka semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP.

H8 : Pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Banyaknya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi pemerintah sebagai abdi masyarakat (Liestiani, 2008). Ingram (1984) menjelaskan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan yang diprosikan dengan jumlah penduduk, memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.

Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah.

H9 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu Kriteria-kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota pada tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Mendapat opini WTP dan WDP dari BPK RI.
3. Kabupaten/Kota yang tidak termasuk ke dalam daftar daerah tertinggal.
4. Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode dokumentasi. Data keuangan yaitu LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang dikumpulkan, diperoleh dari Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dilanjutkan Semester II tahun 2013 dari kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Jakarta Pusat, sedangkan data non keuangan seperti jumlah anggota DPRD, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota SKPD, data profil kepala daerah dan atau wakil daerah, jumlah penduduk diperoleh dari website resmi masing-masing Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang terpilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah 134 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2013.

Model Penelitian

$$DSCLR = \beta_0 + \beta_1 LN_SIZE + \beta_2 UKLEG + \beta_3 AGE + \beta_4 LN_WEALTH + \beta_5 SKPD + \beta_6 SPEP + \beta_7 INDEP + \beta_8 LEV + \beta_9 LN_POP + e$$

Keterangan :

DSCLR	: Tingkat Pengungkapan wajib LKPD
LN_SIZE	: Ukuran Pemerintah Daerah
UKLEG	: Ukuran Legislatif
AGE	: Umur Administratif Pemda
LN_WEALTH	: Kekayaan Pemerintah Daerah
SKPD	: Diferensiasi Fungsional
SPEP	: Spesialisasi Pekerjaan
INDEP	: Rasio Kemandirian Keuangan Pemda
LEV	: Pembiayaan Utang
LN_POP	: Jumlah Penduduk
e	: Standar Error

OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Dependen

Tingkat pengungkapan wajib LKPD yang dimaksud adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam neraca menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca penulis menggunakan sistem *scoring*. Sistem *scoring* tersebut adalah dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebanyak 46 butir item pengungkapan. Lebih lanjut, memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam LKPD sesuai dengan daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi menjadi dua bagian, yaitu “ya” dan “tidak”. Setiap satu item pengungkapan yang sesuai dengan daftar pengungkapan diberi nilai 1.

$$DSCLR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang seharusnya diungkapkan}}$$

Variabel Independen

Variabel ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan Ln Total aset Pemda. Aset dapat menunjukkan sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Variabel ukuran legislatif diukur dengan menggunakan jumlah anggota DPRD. Karena DPRD sebagai badan legislatif mempunyai fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah agar Pemerintah Daerah dapat mengelola anggaran yang ada untuk digunakan sebaik mungkin.

Variabel Umur Pemda diukur menggunakan sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan pembentuk suatu daerah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, variabel ini dinyatakan dalam satuan tahun.

Variabel Kekayaan Pemda diukur menggunakan Ln PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pemerintah itu sendiri.

Variabel Diferensiasi Fungsional diukur menggunakan jumlah SKPD. Diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat pemerintah daerah. Dalam struktur aparat pemerintahan daerah, pembagian departemen fungsional disebut dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Variabel Spesialisasi Pekerjaan diukur menggunakan latar belakang kepala daerah. bahwa kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi akan lebih mudah memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga dapat menyajikan lebih lengkap informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Latar belakang kepala daerah ini merupakan variabel *dummy*, apabila latar belakang kepala daerah dan atau wakil

kepala daerah berasal dari bidang ekonomi akan diberi nilai 1, tetapi jika tidak berasal dari bidang ekonomi akan diberi nilai 0.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Variabel Pembiayaan utang diukur dengan menggunakan *debt to equity*, yaitu *total debt* dibagi dengan *total equity*. Kewajiban atau utang merupakan transaksi yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Variabel Jumlah Penduduk diukur menggunakan Ln jumlah penduduk suatu daerah pada Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk adalah jumlah populasi manusia yang tinggal pada suatu daerah kabupaten/kota yang memproksikan kompleksitas pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah seringkali menjadi kendala dalam hal penganggaran, pencatatan, pengungkapan dan juga pelaporan. Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memiliki informasi yang cukup terkait permasalahan atas aset daerah yang biasanya diperoleh dalam waktu yang relatif lama. Daerah dengan total aset besar cenderung memiliki kualitas pengelolaan

aset dan juga kontrol atas aset daerah yang kurang baik dan memperoleh catatan dari BPK.

Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Karena belum tentu banyaknya jumlah anggota DPRD diikuti oleh adanya fungsi dan peran yang semakin baik pula. Sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dimiliki anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan. Banyaknya isu tentang korupsi yang dilakukan anggota DPRD juga turut menyumbang alasan atas penurunan kinerja pemerintah yang kemudian berdampak pula pada penurunan kinerja atas tingkat pengungkapan laporan keuangan (Sumarjo, 2010).

Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa umur administratif Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Dengan demikian, semakin tua atau semakin lama umur Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan LKPD.

Hasil pengujian hipotesis empat menunjukkan bahwa kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dengan demikian, semakin besar jumlah kekayaan Pemda yang diprosikan oleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan LKPD.

Hasil pengujian hipotesis lima menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil pengujian

hipotesis lima menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Hasil pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP. Sehingga seharusnya kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi lebih dapat mengelola keuangan dengan baik, namun ternyata latar belakang kepala daerah tidak berpengaruh terhadap perlakuan pengungkapan yang lengkap. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah dan atau wakilnya yang memiliki latar belakang ekonomi tidak semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik atas pengelolaan keuangan. Sehingga kepala daerah dengan latar belakang ekonomi tidak mendorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada LKPD.

Hasil pengujian hipotesis tujuh menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Besaran rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan maka semakin tinggi pula pemerintah membiayai sendiri kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada semakin tinggi pula tingkat kemandirian Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini

menyebabkan tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah. Jadi, Pemerintah Daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas LKPD dari pihak eksternal.

Dengan demikian, semakin besar jumlah rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, maka semakin rendah tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Hasil pengujian hipotesis delapan menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Dari penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat pembiayaan hutang Pemda tahun 2013 adalah 0,73% artinya bahwa memang kegiatan operasional yang dibiayai oleh hutang jumlahnya sangat kecil serta nilai terendah adalah 0% artinya tidak semua Pemda melakukan pembiayaan kegiatannya melalui hutang. Sehingga pembiayaan utang tidak memberikan pengaruh kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan LKPD.

Hasil pengujian hipotesis sembilan menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dapat diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara membaca isi laporan keuangan dan manfaat apa yang didapatkan setelah membaca dan memahaminya, sehingga tingkat keingin tahaun dan juga tingkat kebutuhan terhadap laporan keuangan menjadi rendah. Hal tersebut tidak mendorong Pemda untuk melakukan

pengungkapan wajib laporan keuangan secara lengkap.

PENUTUP

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2013.

Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat pengungkapan wajib adalah sebesar 58,60%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013 masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum taat terhadap SAP.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dari 9 (Sembilan) variabel yang diuji hanya 3 (tiga) variabel independen yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, yaitu umur administratif Pemerintah Daerah dan kekayaan Pemerintah Daerah dan diferensiasi fungsional.

Sedangkan, variabel rasio kemandirian keuangan Pemda memiliki pengaruh, namun pengaruh negatif signifikan.

Variabel independen lainnya, yaitu ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang dan jumlah penduduk tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanpour, F. 1991. *Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effect of Determinants and Moderators*. Academy of Management Journal, Vol. 34:555-590.
- Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. FEUI. Jakarta.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. 2013. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*. 2013. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Khasanah, Nur Lailatul, dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol 3/No. 3/Tahun 2014/Hal 1-11.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. *Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Lesmana, Sigit I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Liestiani, Annisa. 2008. *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 No. 2. Jakarta.
- Suhardjanto, D., dan Lesmana, S.I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Jurnal STIE Bank BPD Jateng Vol. 6 No. 2. Surakarta.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.